

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2021 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |

Segera Tetapkan Kembali Tersangka Korupsi

PENGAMAT hukum Universitas Lampung, Yusdianto, meminta Polda Lampung segera menetapkan Komisaris Utama PT Usaha Remaja Mandiri, Hengki Widodo alias Engsit, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Jalan IR Sutami—simpang Sribawono.

"Tidak mesti menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK RI atau BPKP. Selama tindak pidana korupsi yang diketahui ada jumlah kerugian yang ditimbulkan, Polda Lampung berhak untuk menetapkan kembali tersangka," kata dia, Jumat (23/7).

Ia melanjutkan sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi (MK), sepanjang sudah diketahui jumlah kerugian keuangan negara, Polda Lampung harus menindaklanjuti dan meneruskan proses penyidikan dan penyelidikan. "Walaupun

sempat ada gugatan praperadilan, jadi, tidak ada alasan Polda untuk tidak menindaklanjuti ini atau meneruskan. Ini adalah ujian Polda Lampung, harus segera dilakukan penyelidikan dan diimpahkan ke pengadilan," ujar dia.

Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung masih berhati-hati dalam penanganan perkara ini, usai gugatan praperadilan yang diajukan Engsit ditolak Majelis Hakim. Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafarin mengatakan sebelum kembali menetapkan Engsit sebagai tersangka, pihaknya terlebih dahulu menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPK RI.

"Kami mau minta surat lagi ke BPK karena sampai saat ini belum ada diperiksa (audit kerugian negara)," kata dia. (CK2/RUL/KI)